

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

RINGKASAN SKRIPSI



OKKYNAWA VALENTINE BR. PAKPAHAN

NIM: 2021118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
PALEMBANG**

2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Okkynawa Valentine Br. Pakpahan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi

Universitas Katolik Musi Charitas

Jl. Bangau No.60 Palembang

E-mail: okkynawavalentine28@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten/kota provinsi sumatera selatan periode 2020-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang ada di provinsi sumatera selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan diperoleh 17 kota dan kabupaten dengan total 51 sampel. Uji analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas, analisis regresi linier berganda dengan menggunakan taraf uji t, uji F dan uji R^2 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional own-source revenue and equalization funds on capital expenditure in the district / city government of South Sumatra province for the period 2020-2022. The data used is secondary data. The population in this study are districts and cities in South Sumatra province. The data collection technique used the documentation method and obtained 17 cities and districts with a total of 51 samples. The data analysis test uses descriptive statistics, normality test, heteroscedasticity test, autocorrelation test and multicollinearity test, multiple linear regression analysis using the t test level, F test and R2 test. The results showed that partially local own-source revenue and equalization funds had no effect on capital expenditure. Simultaneously, local revenue and equalization funds have no effect on capital expenditure.

Keywords: Original Regional Income, Balancing Funds, Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan kondisi di dalam negeri yang menunjukkan penurunan penerimaan negara dan inisiatif pemerintah pusat dalam mensubsidi pemerintah daerah untuk melaksanakan programnya, hal ini sejalan dengan awal munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dijadikan sebagai landasan utama dalam melaksanakan sistem desentralisasi agar tujuan dari otonomi daerah tercapai. Melalui kedua undang-undang tersebut, seluruh pemerintah daerah di Indonesia, diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuannya. Hal ini terjadi dikarenakan belum terjalinnya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah. Jika desentralisasi fiskal terus dijalankan dengan kebijakan dan formulasi yang sama, maka tujuan desentralisasi fiskal dalam rangka pemerataan pembangunan nasional hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi hasil pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah, Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut dalam Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.3.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
	2020	3.617.058.256.621	3.375.100.984.842	93,31
PAD	2021	4.747.088.053.007	3.865.463.033.085	81,43
	2022	5.385.438.862.341	4.930.955.849.520	91,56

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.2

Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
	2020	6.234.368.422.477	5.835.674.693.538	93,60
DP	2021	6.009.694.627.380	5.712.683.072.712	95,06
	2022	5.160.450.355.387	5.029.223.442.530	97,46

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
	2020	2.300.677.274.954	1.664.700.767.363	72,36
BM	2021	2.191.283.655.818	1.836.834.114.022	83,82
	2022	1.631.148.929.785	1.536.370.414.095	94,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari ketiga tabel diatas menginformasikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Sedangkan dana perimbangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 yang berarti pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan dana yang ditransfer dari pusat ke daerah agar dapat membiayai belanja daerahnya. Selanjutnya belanja modal mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Tetapi, dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi belanja modal belum bisa dinyatakan efektif karena belum mencapai 100%.

Berdasarkan kutipan media *sumsel inews* Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, Lydia K Christyana mengatakan, hingga akhir Januari 2022 realisasi pendapatan daerah Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Dukungan dana dari pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan kutipan media *antara news* realisasi belanja pemerintah provinsi Sumatera Selatan mencapai 46,50 persen atau senilai Rp 19,29 triliun dari pagu anggaran hingga Agustus 2023. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

Sumsel Lydia K Christyana mengatakan realisasi itu terutama disumbang oleh belanja operasi sebesar Rp 12,04 triliun atau sebesar 48,60 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian diikuti oleh belanja transfer yang telah tersalurkan sebanyak Rp 3,67 triliun atau sebesar 47,84 persen persen dari pagu dan belanja modal yang telah terealisasi Rp 2,58 triliun atau 37,56 persen. Menurutnya, jumlah realisasi belanja yang belum mencapai 50 persen hingga jelang menutup triwulan III 2023 itu, maka terdapat beberapa hal juga yang patut diwaspadai. Sehingga hal ini perlu dipastikan agar tidak mempengaruhi keberlanjutan program kerja yang sudah ada dari masing-masing daerah. Untuk optimalisasi realisasi belanja APBD Sumsel sampai dengan akhir 2023, katanya diperlukan penyelesaian pekerjaan belanja modal tidak melampaui batas waktu penyelesaian yang sudah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marselina Ade Putri dan Alfriadi Dwi Atmoko (2020); Eky Ermal, Warsani Purnama Sari, Pandapotan Ritonga dan Dinda Fadillah (2021); Eve Ida Malau, Calen, Victor Marudut, Kharisma Yudha (2020) memperoleh hasil penelitian yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmayanti, Bahruddin Semaila, Zainudin, Muhammad Ridwan (2021); Zhara Saski Widodoasri Permata (2016) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal tetapi dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2022”

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan bagian-bagian masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022?

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022?

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut teori keagenan, hubungan keagenan adalah pengaturan (kontrak) di mana prinsip dan agen setuju bahwa agen memiliki wewenang untuk membuat pilihan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976).

Pemerintah pusat bertindak sebagai kepala atau pemberi wewenang dalam pemerintahan, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agen atau melaksanakan tugas dan wewenang. Namun, dalam teori ini juga ada anggapan bahwa pihak agen tidak dapat diandalkan untuk bertindak demi kepentingan principal. Pihak agen yang mengelola pemerintahan daerahnya masih bergantung pada bantuan dana perimbangan, yang menyebabkan daerah tersebut tidak mandiri. Teori ini muncul karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen karena hubungan keagenan dapat menyebabkan masalah antara prinsipal dan agen. Pemerintah daerah, sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun.

Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pemerintah pusat. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan belanja modal sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses pembentukan modal yang mengambil bentuk penambahan persediaan atau aset tetap yang menghasilkan manfaat selama beberapa periode akuntansi, bersama dengan biaya yang terkait dengan pemeliharaan yang meningkatkan dan mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian asosiatif kausal untuk mengetahui nilai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan yang relevan antara dua atau lebih variabel peneliti (Sugiyono, 2016:50).

Ukuran Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi 13 daerah Kabupaten dan 4 daerah Kota sehingga total populasi adalah 17 data.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019:127). Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut (Sugiyono, 2017) Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2020-2022, dengan jumlah sampel sebanyak 17 daerah.

Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode adalah Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis maupun gambar. Dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2022 di website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2019:193). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2022 yang melalui website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia atau <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> , website BPS Provinsi Sumatera Selatan ,website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah	Total Pendapat Asli Daerah dari Laporan Realisasi APBD
Dana Perimbangan (X ₂)	Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	DAU + DAK + DBH	Total Dana Perimbangan dari Laporan Realisasi APBD.
Belanja Modal (Y)	Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan	Total Pendapatan Asli Daerah dari Laporan

memberi manfaat lebih dari	Bangunan +	Realisasi
satu periode akuntansi serta	Belanja Jalan,	APBD
melenihi batasan minimal	Irigasi dan	
kapitalisasi aset tetap atau	Jaringan +	
aset lainnya yang ditetapkan	Belanja Aset	
pemerintah.	Lainnya	

Sumber : Penulis, 2023

Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019:206).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan telah terdistribusi dengan baik secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018) bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel independen atau variabel dependen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Multikolinieritas dapat dilihat dari (1) *tolerance value*

dan lawannya (2) nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah yang memiliki *tolerance value* diatas 0,10 (*tolerance value* > 0,10) atau sama halnya dengan nilai VIF dibawah 10 (VIF < 10). Apabila *tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak mengalami heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji spearman, pada tingkat signifikansi 5%. Jika signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika tingkat signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode tahun ini dengan kesalahn pengganggu pada periode tahun ini dengan kesalahan pengganggu pada periode tahun sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mengetahui uji *run test*. Uji *run test* merupakan bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi. Dasar penentuan terjadinya autokorelasi atau tidak adalah bila p-value < 0,05 maka residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Sedangkan bila p-value > 0,05 maka residual random atau tidak pernah terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Regresi linear berganda digunakan peneliti bila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (naik turunnya), bila dua variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Model analisis ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Belanja Modal
- x_1 : Pendapatan Asli Daerah
- x_2 : Dana Perimbangan
- a : Konstanta
- $b_1 b_2$: Koefisien regresi
- e : error

3. Uji Hipotesis

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka disimpulkan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2018).

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima, menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak, menyatakan bahwa variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi R *square* bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil menunjukkan keterbatasan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Nilai yang mendekati satu menunjukkan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan sebanyak 17 kabupaten dan kota, dengan periode waktu dari tahun 2020 hingga 2022. Lalu, jumlah sampel Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten dan Kota, sebagai berikut.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kab. Banyuasin | 10. Kab. Ogan Komering Ulu |
| 2. Kab. Empat Lawang | 11. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
| 3. Kab. Lahat | 12. Kab. Ogan Komering Ulu Timur |
| 4. Kab. Muara Enim | 13. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |
| 5. Kab. Musi Banyuasin | 14. Kota Lubuk Linggau |
| 6. Kab. Musi Rawas | 15. Kota Pagaralam |
| 7. Kab. Musi Rawas Utara | 16. Kota Palembang |
| 8. Kab. Ogan Ilir | 17. Kota Prabumulih |
| 9. Kab. Ogan Komering Ilir | |

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 51, data diperoleh dari laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2022 yang seluruhnya didapatkan pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah periode 2020-2022 dan situs BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, nilai dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai 2022 berbeda-beda, dan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka koefisien determinasi sebesar 0,003 atau 0,03% dengan nilai signifikansi sebesar 0,734 maka nilai ini lebih tinggi

dibandingkan dengan nilai 0,05. Nilai $t_{hitung} -0,342 < t_{tabel} 2,01063$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa data pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif di beberapa daerah Provinsi Sumatera Selatan maka diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, hal ini dapat dikarenakan adanya nilai PAD yang rentangnya sangat jauh, yaitu antara Kota Palembang dan Kabupaten OKU Selatan, terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan angka rasio PAD dengan rincian angka terendah 0,03 terdapat di Kabupaten OKU Selatan dan angka tertinggi 0,43 terdapat di Kota Palembang. PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini tidak terdapat keselarasan dan tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Marselina Ade Putri,dkk (2022), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Eky Ermal,dkk (2021), dimana hasil penelitiannya tentang Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Nilai dari total keseluruhan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai 2022 berbeda-beda, dan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini dibuktikan pada Uji t.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka koefisien determinasi sebesar 0,003 atau 0,03% dengan nilai signifikansi sebesar 0,953 maka nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 0,05. Nilai $t_{hitung} -0,059 < t_{tabel} 2,01063$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal ini menunjukkan

bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak bergantung terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan Belanja Modal. Dikarenakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak terlalu bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini tidak terdapat keselarasan dan tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Marselina Ade Putri,dkk (2022), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Eky Ermal,dkk (2021), dimana hasil penelitiannya tentang Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2022. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.
2. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.

Keterbatasan

Penelitian menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya melihat dari oposisi belanja modal saja.
2. Penelitian ini hanya melihat dari satu provinsi yaitu Sumatera Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan serta keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk semakin menggali potensi PAD yang ada sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melihat perbandingan antara belanja modal dengan belanja daerah lainnya.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mengambil data Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan. Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku juga untuk Kabupaten/Kota di luar provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390.
- Atmoko, A. D., & Putri, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019). *JPA : Journal of Public Accounting*, 2 (2), 53-72.
- BPKAD. (2023). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023. Diambil kembali dari <https://bpkad.sumselprov.go.id/ppid/>
- BPS. (2020). Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka. Diambil kembali dari <https://sumsel.bps.go.id?>

- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 85-94.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 197-214.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44-52.
- Harmayanti, H., Semaila, B., Rahman, Z., & Manulusi, M. R. (2021). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(4), 805-816.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Malau, E. I., Calen, C., Siregar, V. M., & Saragih, K. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(1), 356-361.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business, and Management Science Journal*, 1(1), 22-28.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28.

- Permata, Z. S., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(9).
- Pradita, R. R., & Prastiwi, D. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 136-147.
- Purpitasari, P., & Kurnia, K. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(11).
- Rifai, R. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(7).
- Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah, C. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. *KOLEGIAL*, 7(2), 150-166.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh dan Dana Perimbangan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21-37.
- Wulansari, D. T. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.